

EPISTEMEUS

ESSAYS

VOLUME 1; ISSUE 1 24.07.2026

Relevansi Magnifica Humanitas ditengah Krisis Intelektual & Kemanusiaan di Indonesia

Stephanie Emily Setiawan

PENDAHULUAN

PERKEMBANGAN pesat teknologi digital & AI (*Artificial Intelligence*) telah menggerakkan hampir seluruh aspek masyarakat kontemporer. Teknologi masa kini telah membentuk pola komunikasi, ber-sosial media, pola ekonomi, pendidikan, budaya dan bahkan gaya hidup seseorang. Kemajuan ini membawa berbagai manfaat & efisiensi terhadap pekerjaan, akses informasi yang luas, & berkembangnya inovasi terbaru. Namun, di satu sisi lain perkembangan ini telah menghadirkan berbagai persoalan serius seperti budaya konsumerisme digital, maraknya disinformasi, ketergantungan terhadap AI, ketimpangan ekonomi digital serta krisis dalam aspek etika-moral-relasional.

Menanggapi pertanyaan “Apakah kemajuan teknologi pada hakikatnya membawa manusia menuju peradaban yang lebih manusia atau justru malah menjauhkan manusia dari martabatnya dan bahkan dalam menghargai martabat sesamanya”, Paus Leo XIV menjawab ini dengan menulis ensiklik *Magnifica Humanitas* sebagai bahan refleksi moral & spiritual dalam menanggapi perkembangan arus yang pesat di tengah era digital ini. Ensiklik ini agaknya memusatkan manusia sebagai *centre* dari setiap aspek perkembangan teknologi, termasuk AI, hal ini tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan teknis, melainkan etis & antropologis menyangkut hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kapasitas intelek yang rasional dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya & moralitas dari masing-masing individu. Paus Leo XIV kembali menyuarakan *technocratic paradigm* yang sebelumnya digagaskan oleh mendiang Paus Fransiskus

dalam ensiklik *Laudato Si'* yang memiliki kecenderungan mereduksi manusia menjadi objek ekonomi & alat produktivitas semata.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia menghadapi banyaknya krisis moral dan tantangan seperti tersebarnya hoaks, polarisasi ideologis, polarisasi politik, rendahnya literasi, debat kusir berbasis dialog antar-kepercayaan yang tidak membuahkan iman sejati, serta meningkatnya ketergantungan masyarakat, terutama anakanak/remaja (dalam konteks akademis) terhadap AI. Fenomena yang saya uraikan diatas menunjukkan bahwasanya kemajuan teknologi dan penggunaanya tanpa landasan etis dapat mengancam kohesi sosial, nilai-nilai kemanusiaan yang juga tertera dalam Pancasila (sila ke-2), serta nilai nilai pembangunan spiritual & moral yang sejati sebagai masyarakat yang dapat berkontribusi untuk mencapai *bonum commune* (kesejahteraan umum).

Kata Kunci: Martabat, Pancasila, Magnifica Humanitas, Kecerdasan Buatan (AI), paradigma teknokratis, kesejahteraan umum, realisme, humanisme

I. MARTABAT MANUSIA SEBAGAI “CENTRE OF CIVILIZATION”:

Gagasan dalam *Magnifica Humanitas* bahwasanya manusia haruslah menjadi pusat dari segala perkembangan teknologi dan peradaban modern memberikan suatu ide yang serupa dengan filsafat klasik (Aristotelian) yang menempatkan manusia sebagai ζων Πολιτικον (zoun politikon) atau makhluk politik yang rasional & sosial, yang mencapai kesempurnaan sejatinya melalui kehidupan disiplin bermoral dan komunitas pergaulan yang baik. Paus Leo XIV kembali mengumandangkan penolakan Gereja Katolik, diambil dari ensiklik mendiang Paus Fransiskus, *Laudato Si'*, terhadap paradigma teknokratis. Definisi dari paradigma teknokratis itu sendiri berakar dari bagaimana manusia memusatkan rasionalitas teknis, praktis, efisiensi & ketergantungan teknologi dalam hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa paradigma ini menggagaskan bahwa hampir semua masalah umat manusia dapat diatasi oleh teknologi, AI dan apapun yang berkaitan dengan nya. Baik dalam ensiklik *Magnifica Humanitas* maupun *Laudato Si'*, Gereja menolak pandangan modernistik yang menganggap bahwasanya:

“Kemajuan teknis = Kemajuan Moral & Peradaban”

Paradigma ini menyebabkan manusia memandang alam dan sesamanya tidak sesuai kodrat dan fitrahnya, yaitu sebagai objek yang dapat dengan mudah dikuasai, diatur dan dikendalikan. Dalam konteks AI (*Artificial Intelligence*) yang dikemukakan oleh Paus Leo XIV, algoritma digital & kapitalisme digital dengan jelas mengatur gaya hidup manusia modern. Didalam Kitab Suci tertulis bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan-Nya (Kej 2:15).

“Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?”, itulah yang disampaikan oleh Santo Markus Rasul (Mark 8:36) kritik langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat kontemporer yang mengejar kemajuan teknologi & material namun kehilangan makna & rasa kemanusiaan terhadap diri mereka sendiri dan bahkan terhadap sesamanya. Dalam Tradisi saudara se-manusia kita, yaitu Muslim menegaskan dalam tradisi kepercayaan mereka dalam Al-Quran Surah Al Baqarah 2:30: “*Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.*” Mereka berkata, “*Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, padahal kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?*” dalam kepercayaan mereka pun, kita sebagai Manusia

memiliki tanggung jawab moral terhadap ciptaan, bukan sebagai pen-guasa materil yang bebas berkelana, mengeksploitasi kemajuan dunia diatas penderitaan sesamanya. Begitupun dalam Buddhisme, teknologi menyimpan jawaban tentang bagaimana menghadapi usia tua & kematian & secara paradoks, upaya manusia kontemporer untuk mencapai kesempurnaan justru malah memperluas penderitaan orang lain, pada akhirnya menghancurkan semua spesies di bumi. Bagaimana Buddhisme menghadapi ancaman-ancaman paradigma teknokratis tersebut? Kebuddhaan biasanya dipahami sebagai suatu keadaan yang dapat didekati tanpa batas, tetapi tidak dapat dilanggar. Baik *Arhat* maupun *Bodhisattva* pada hakikatnya tetap berada diluar kebuddhaan karena mereka eksis dengan sempurna di dunia yang sifatnya fana. Penolakan mereka terhadap hal-hal duniawi yang bersifat asketis dapat kita analogikan dengan seseorang yang memahami kenyamanan yang dijanjikan oleh pelbagai manfaat/efisiensi, seperti uang, namun mampu menolaknya. Para Bud-dhis, menyikapi pergolakan teknologi dengan *sati*, ialah sikap bijak dengan kesadaran penuh. Dalam *Majjhima Nikaya No.135: Culakammavibhanga Sutta*, dikatakan bahwa makhlukmakhluk adalah pemilik & pewaris dari perbuatan mereka, yang berasal mula dari perbuatan mereka, & memiliki perbuatan mereka sebagai pelindung, & adalah perbuatan yang membedakan makhluk makhluk sebagai hina dan mulia.

Jadi, baik dari pandangan Kristen, Islam, maupun Hindu (dan tentunya juga terdapat dalam kepercayaan lainnya), kritik terhadap paradigma teknokratis yang diusulkan oleh Gereja Katolik justru menemukan kesinambungan dari pelbagai filsafat dan kepercayaan di dunia. Mereka semua mengakui bahwasanya dimensi moral dan hakikat manusia tidak boleh direduksi menjadi sekadar fungsi ekonomi atau produktivitas digital. Media sosial seringkali menawarkan sebuah tolak ukur yang baru untuk mengatur gaya hidup masyarakat kontemporer, di zaman ini banyak sekali orang yang menilai harga dirinya dengan *engagement dan likes*, lalu seakan-akan sekarang sangat menormalisasi *oversharing* dan membuka jendela yang tak bisa tutup kembali sehingga dunia bisa masuk & menyaksikan ranah personal yang tidak seharusnya diunggah dalam media sosial.

Uraian di bagian pertama ini mengajak seluruh umat manusia, bukan hanya orang Katolik, untuk merenungi esensi *Magnifica Humanitas* terutama dengan kosakata *technocratic paradigm* -nya dan Manusia sebagai *centre of human civilization*. Maraknya perkembangan algoritma, bentuk kapitalisme & AI justru menjadi celah untuk terjadinya suatu seruan universal mengenai prinsip-prinsip yang ditulis dalam baik *Laudato Si'* maupun *Magnifica Humanitas*. Pada titik inilah Paus Leo XIV mem-

peringatkan kita, bahwa umat manusia sedang mengalami krisis antropologis, yaitu krisis mengenai “apa arti menjadi manusia”, kemajuan tak diimbangi dengan kebajikan dan kebijakan, dan bahkan intelektualisme dipandang menjadi sesuatu yang sangat rendah karena maraknya ketergantungan manusia pada ringkasan AI atau jawaban AI, menghasilkan masyarakat yang krisis makna spiritual & moral.

II. MENARA BABEL MODERN, KRISIS KEMANDIRIAN BERPIKIR & RELEVANSINYA UNTUK INDONESIA

Sebagaimana dikatakan Socrates dalam *Apology*, "*The unexamined life is not worth living.*" Dalam konteks digital kontemporer, tantangan terbesar bukanlah kurangnya informasi, melainkan hilangnya kemampuan manusia untuk merefleksikan dan mengevaluasi informasi tersebut secara kritis. Ketika algoritma mulai menentukan apa yang dibaca, dipercaya, dan dipikirkan oleh seseorang, kemampuan refleksi yang menjadi inti kemanusiaan perlahan mengalami kemunduran.

Paus Leo XIV mengamati bahwa era digital saat ini memiliki potensi menjadi sebuah bentuk baru dari Babel. Peningkatan teknologi, AI, media sosial, serta algoritma digital telah menyebabkan terciptanya jaringan komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Secara ironis, semakin canggihnya teknologi yang membantu koneksi manusia, semakin besar juga kemungkinannya untuk terjadi fragmentasi, polarisasi pemikiran, serta kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain. Sementara manusia di zaman Babel tidak mampu lagi berkomunikasi karena disebabkan oleh perbedaan bahasa, maka di era Babel modern, manusia kehilangan kemampuan untuk berdialog di tengah era *echo chambers*, informasi-informasi yang dipersonalisasi oleh algoritma internet, dan kecenderungan untuk mengonfirmasi keyakinan yang telah dimiliki oleh masing-masing individu tanpa objektivitas yang jelas (*confirmation bias*).

Perlu ditegaskan kembali bahwa fenomena “Menara Babel Modern” ini bukan hanya berbicara persoalan teknologi, hal ini membicarakan hakikat manusia secara antropologis, sosiologis & spiritual. Manusia kontemporer biasanya memilih kenyamanan konformitas dibandingkan *free will* yang menuntut tanggung jawab & pencaharian intelektual. *Free will* yang diberikan oleh Tuhan dengan sedemikian rupa mengharuskan manusia untuk mempertanyakan asumsi-asumsi & proposisi-proposisi yang telah diterimanya dengan menguji validitasnya, seberapa koheren informasi tersebut, d.l.l. Namun, budaya digital kontemporer yang menyajikan informasi *oversimplified* justru mendorong manusia secara psikis untuk mengikuti arus mayoritas, tren, atau opini yang paling populer. Sebagai akibat, umat manusia kehilangan makna dari eksistensi otak mereka, mereka tidak lagi berpikir secara rasional, tidak lagi berpikir secara mandiri, penuh ketergantungan serta mengulang atau mengelukan narasi yang dibentuk oleh kelompok sosial & digital.

Banyak individu tidak lagi bertanya apakah suatu informasi valid atau invalid, melainkan apakah informasi tersebut memuaskan & sesuai dengan kepentingan politik, agama, *sub-culture*, atau kelompok/individu digital yang mereka ikuti, dengan demikian, ini adalah bentuk radikalisme baru & pudarnya tujuan manusia secara antropologis.

Perihal yang saya uraikan diatas tentunya masih sangat relevan bagi Indonesia dikarenakan kita sekarang dihadapang oleh gejala sosial yang sangat serius, debat publik yang seharusnya bersahaja, menukarkan pendapat yang memiliki dasar kehilangan makna & telah menjadi arena pertarungan identitas yang lebih bertujuan untuk mencari engagement, memuaskan hasrat nafsu kelompok sendiri daripada merekonsiliasi argumentasi dari kedua belah pihak (*contoh: Debat Agama, Debat Atheis Vs Theis, Debat saling memotong*). Manusia seringkali menggunakan rasio untuk membenarkan dan merasionalisasi posisi yang telah mereka pilih secara *bias* (*contoh: menggunakan teori konspirasi*) daripada menemukan dan menjelajahi informasi sampai bertemu dengan yang apa yang disebut sebagai objektif. Krisis kemandirian intelektual juga sangat mencolok di Indonesia, terutama dalam dunia riset & pendidikan, serta persoalan AI. Perkembangan AI tentunya memberikan efisiensi yang luar biasa hebatnya bagi para pelajar & pengguna internet dalam memperoleh atau membuat suatu narasi. Namun, jika teknologi AI tidak digunakan menggunakan daya berpikir kritis, analitis & tanggung jawab etis maka pendidikan rakyat Indonesia sejatinya sudah berubah menjadi *proses instant mass reproduction of answers* (reproduksi jawaban secara instan), tanpa perbedaan ciri khas berpikir, analisis atau refleksi moral.

Di dalam *framework* Magnifica Humanitas, amatlah perlu algoritma-algoritma AI & unsur digital lainnya ditetapkan & dipastikan bahwa segenap situasi yang ditangani akan ditanggapi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil & beradab, jadi berdasarkan keharusan etis yang *nonnegotiable*. Contoh sederhana yang bisa saya berikan adalah bahwasanya segenap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah harus secara terbuka bagi perwujudan keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan segenap warga. Justru disinilah peran institusi agama ditantang, kita tahu bahwa semua agama mengklaim bahwa mereka berbicara atas terang Tuhan Yang Maha Esa, etika yang mengarahkan masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh agama-agama. Sekarang bukan saatnya untuk kita debat agama, hal itu *outdated* & tidak penting bagi kepentingan kolektif, sekarang adalah saatnya untuk agama-agama mengubah fokus dari perebutan penganut ke sinergi bersama untuk menyepakati tuntutan-tuntutan etis yang tidak bisa ditawar, yang harus ditanamkan kedalam algoritma-algoritma digital.

Terakhir, agama agama di Indonesia & dunia tidak perlu bertolak dari titik nol. Kita semua sudah memiliki kesepakatan yang amat berharga, bermutu, yang memadai jika dibawa ke panggung global, yaitu dengan **Pancasila** kita. Lima sila Pancasila, terutama dalam sila ke-1 sampai 5 adalah prinsip & filsafat etis masyarakat Indonesia yang harus ditanamkan ke dalam algoritma-algoritma bermedia sosial, menggunakan AI & ketika menyelam ke dunia digital.

III. MEMPERTAHANKAN REALISME & HUMANISME KRISTEN

Gereja Katolik tidak menilai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu ancaman terhadap iman atau martabat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi diterima sebagai karunia yang diciptakan melalui keterampilan kreatif yang diberi oleh Tuhan kepada manusia. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak penderitaan dapat dikurangi, kualitas hidup dapat dimaksimalkan, serta kemungkinan-kemungkinan baru dalam perkembangan peradaban dapat dicapai. Namun, hal ini tidak berarti bahwa peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi boleh berjalan tanpa peduli terhadap etika dan moralitas yang lebih tinggi lagi. Kecerdasan manusia selalu harus dikendalikan untuk kepentingan umum, penegakan keadilan, perlindungan terhadap orang-orang yang lemah, serta kesetiaan terhadap sesama dan alam sekitarnya.

Melalui perspektif tersebut, masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer tidaklah mengenai pilihan antara mengejar kemajuan teknologi atau tidak. Masalah nyata yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah: Ke arah mana perkembangan teknologi dunia akan diarahkan? *Magnifica Humanitas* menawarkan sebuah jawaban yang cukup memuaskan, menggunakan pandangan Realisme & Humanisme Kristen. Respons yang tepat terhadap isu seperti ini bukanlah dengan menerapkan optimisme yang naif maupun sikap pesimis yang berlebihan.

Realisme Kristen menawarkan pandangan bahwasanya teknologi adalah bagian dari kemampuan manusia, yang juga merupakan karunia Tuhan sehingga ia (manusia), dibedakan dengan spesies-spesies lain secara spiritual. Sebagaimana dikatakan dalam Kitab Kejadian, manusia adalah *imago Dei* (gambar dan rupa Tuhan) dan kita diberi mandat untuk memelihara bumi, namun pada saat yang sama kita juga harus menyadari bahwa setiap pencapaian manusia akan selalu membawa kita kepada suatu kemungkinan untuk digunakan secara baik & buruk, tergantung seberapa moral kita menggunakan *free will*. Paus Leo XIV, tentunya akan menolak dua pandangan ekstrem yang seringkali muncul dalam diskursus teknologi modern. Pada satu sisi terdapat kelompok yang meyakini bahwa kecerdasan buatan merupakan solusi dari semua masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Pada sisi lain terdapat kelompok lain yang meyakini bahwa teknologi adalah sesuatu yang berbahaya dan dapat menyebabkan ancaman eksistensial.

Dalam hal ini, humanisme kristen merespons dengan pendekatan yang jauh lebih bijaksana. Teknologi disetujui dan diterima karena

potensi-potensi positif yang dimilikinya dalam mengurangi derita manusia, memberikan akses pendidikan yang lebih luas, meningkatkan layanan kesehatan, serta membantu manusia untuk menikmati kualitas hidup. Santo Thomas Aquinas kemudian mengembangkan gagasan ini dengan menegaskan bahwa kemampuan intelektual manusia memperoleh maknanya ketika digunakan sesuai dengan hukum moral dan demi kebaikan bersama. Kecerdasan pada hakikatnya tidak pernah dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Kecerdasan hanyalah sarana yang harus diatur oleh kebijaksanaan (*sapientia*) dan kebajikan (*virtus*). Karena itu, kemajuan teknologi yang tidak disertai perkembangan moral berisiko menghasilkan masyarakat yang semakin kuat secara teknis tetapi semakin rapuh secara etis & spiritual, karena manusia kehilangan makna. Keseharian seperti ini juga bisa ditemui dalam sastra klasik. Misalnya dalam cerita karya Johann Wolfgang von Goethe berjudul *Faust*. Karakter utamanya memiliki ilmu dan kekuasaan yang sangat luar biasa, tetapi pada waktu yang sama, dia mengalami krisis yang amat mendalam. Cerita ini kiranya dapat mengilustrasikan bahaya apabila pencarian pemajuan dan kontrol atas dunia tidak dibarengi oleh kepintaran moral. Demikian pula, dalam masyarakat modern, meski mereka berhasil membuat sistem cerdas otomatis yang semakin canggih, tapi belum tentu mereka bisa bahagia dan adil.

Cara kita mempertanyakan arah kemajuan semacam ini, serta bagaimana kita mendefinisikan dan mengalaminya, dapat dikatakan sebagai pertanyaan hati nurani dalam diri kita sebagai manusia. Bagaimana kita memandang hubungan kita dengan dunia di sekitar kita, termasuk pekerjaan, lembaga, dan kehidupan komunal, mencerminkan keyakinan mendalam yang membimbing hidup kita. Semua pilihan ini dimulai dengan cinta yang mendefinisikan apa yang benar-benar kita hargai dalam hidup.

Santo Agustinus dari Hippo menggambarkan sejarah manusia sebagai konflik antara dua cinta, yang mengarah pada dua jenis cara hidup, dua kota yang berbeda. Yang satu adalah cinta kepada Tuhan dan sesama, dan yang lainnya adalah cinta yang egois. Bukunya *De Civitate Dei* (Kota Tuhan) menyatakan: “Dua cinta telah menciptakan dua kota: kota duniawi dibangun dari cinta diri, bahkan sampai pada penghinaan terhadap Tuhan; sedangkan kota Tuhan dibangun oleh cinta kepada Tuhan, bahkan sampai pada penghinaan terhadap diri sendiri.”

Seperti yang telah terjadi di masa lalu sepanjang sejarah manusia, kedua cinta ini terus bersaing untuk supremasi di dalam hati setiap orang.

Tidak ada perubahan pada realitas fundamental ini akibat AI.

Diskusi mengenai teknologi sebenarnya bukanlah diskusi mengenai mesin, algoritma, atau *digital innovation*, tetapi justru merupakan pertanyaan mengenai manusia itu sendiri: apa nilai yang dipilih, tujuan apa yang harus dicapai, dan jenis masyarakat yang ingin dibangun. Demikian juga, pembangunan Menara Babel maupun pengulangan pembangunan Bait Allah di masa lampau bukan dimulai dari laboratorium teknologi, pusat data, atau digital corporation, melainkan dimulai dari dalam hati manusia. Tidak diragukan lagi bahwa arah kemajuan ini menunjukkan pilihan antara dominasi, kesombongan, dan egois atau kasih sayang, solidaritas, dan *bonum commune*.

IV. INDONESIA, QUO VADIS?

Pertanyaan yang diajukan di *Magnifica Humanitas* akhirnya menjadi pertanyaan bagi Indonesia, *quo vadis?* Kemana arah bangsa ini akan melangkah ditengah arus revolusi digital?

Akankah Indonesia menggunakan teknologi sebagai sarana untuk merendahkan martabat manusia atau sebaliknya?, yaitu meningkatkan martabatnya dan membangun solidaritas sosial serta sebagai sarana yang berdampak positif seperti membangun kecerdasan pendidikan atau malah semakin sebaliknya, membuat negara ini semakin tenggelam dalam konsumtif dan polarisasi sosial? Masalahnya, bukan hanya sekedar kebijakan atau rencana strategis perekonomian yang menjadi pertanyaan, tetapi lebih dari itu menjadi permasalahan fundamental mengenai siapa identitas bangsa Indonesia dan apa visi mereka dalam menciptakan manusia yang ideal.

Berdasarkan prinsip dasar yang ada pada negara ini, maka Indonesia mempunyai dasar filosofis yang memadai dalam menyelesaikan masalah modern ini. Dimana Sila Ke-2, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara tegas berbicara bahwa manusia harus selalu menjadi tujuan dari pembangunan, dan tidak hanya sekedar alat dari pertumbuhan ekonomi atau sistem teknologi yang rumit. Sedangkan Sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan bahwa manfaat teknologi harus dirasakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali, bukan hanya beberapa orang yang mempunyai kapabilitas materi dan informasi. Demikian, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sangat krusial, namun, ada perihai yang sangat menentukan, ialah: Pancasila hanya dapat direalisasikan & dimainkan peran nya jika masyarakat memulai praktiknya dari *micro-scale*, dari diri mereka sendiri, ia hanya dapat bekerja jika tidak dijadikan semacam filsafat hidup yang malah menyaingi agama. Perlu diingat bahwa manusia Indonesia bukan beretika atau beragama karena ia ber-Pancasila, melainkan ia ber-Pancasila karena ia beretika & beragama.

Namun, kita harus melihat kembali kenyataan bangsa kita, tantangan di dunia Indonesia modern memiliki beberapa potensi masalah lain yang juga harus diperhitungkan. Meskipun tingginya penggunaan media sosial bukan berarti juga bahwa literasi digital para penggunanya cukup baik. Seringkali, ruang publik penuh dengan berita hoax, kebencian, debat kusir, politik fanatik, dan diskusi yang lebih cenderung berdasarkan emosional daripada mencari kebenaran. Kehadiran AI dalam pendidikan tentunya sangat potensial untuk meningkatkan kualitas belajar, namun

ia juga berpotensi melahirkan generasi yang semakin tergantung pada teknologi namun minim keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Di sektor ekonomi, digitalisasi adalah suatu hal yang bisa menjadi potensi pertumbuhan, tapi juga justru menambah celah bagi mereka yang tak mampu beradaptasi dengan perubahan ini.

Ruang publik di Indonesia umumnya memiliki karakteristik *post-truth*, di mana emosi, identitas kelompok, serta preferensi politik lebih banyak berperan dibandingkan dengan kenyataan. Hoax, konspirasi, manipulasi informasi, serta propaganda digital bisa dengan cepat menyebar di ruang publik, karena masyarakat lebih cepat percaya dengan informasi yang mendukung keyakinannya dibandingkan dengan informasi yang objektif. Sehingga, tempat diskusi publik yang semestinya digunakan untuk mendapatkan kebenaran, justru menjadi arena pertarungan narasi dan identitas.

Pada kondisi tersebut, wasiat Santo Yohanes Paulus II pun menjadi semakin penting. Beliau berpesan bahwa jika suatu masyarakat tidak lagi percaya adanya kebenaran objektif yang bisa ditemukan oleh manusia lewat pikiran, bahkan sampai menyatakan bahwa “begitu gagasan tentang kebenaran universal tentang kebaikan, yang dapat diketahui oleh akal manusia, hilang, maka gagasan tentang hati nurani pun pasti berubah.” Hal ini mendorong Paus Fransiskus untuk bertanya dengan realisme: “Apa artinya hukum tanpa keyakinan, yang lahir dari refleksi zaman dahulu dan kebijaksanaan yang agung, bahwa setiap manusia adalah suci dan tidak dapat dilanggar?” Yang kemudian ia simpulkan: “Jika masyarakat ingin memiliki masa depan, ia harus menghormati kebenaran martabat manusia kita dan tunduk pada kebenaran itu. Pembunuhan bukanlah salah hanya karena tidak dapat diterima secara sosial dan dihukum oleh hukum, tetapi karena keyakinan yang lebih dalam. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat dinegosiasikan yang dicapai dengan menggunakan akal dan diterima dalam hati nurani. Suatu masyarakat mulia dan bermartabat, terutama karena dukungannya terhadap pencarian kebenaran dan kepatuhannya pada kebenaran yang paling mendasar.” Simpulan tersebut pernah diteliti secara mendalam oleh para filsuf politik kontemporer seperti Hannah Arendt. Menurut Arendt, dalam penelitian mengenai totalitarianisme, korban utama dari pemerintahan yang totaliter bukanlah orang-orang yang fanatik dalam hal ideologi, tetapi orang-orang yang telah kehilangan kemampuan mereka untuk membedakan antara apa yang benar dan apa yang hanya sekedar imajinasi atau khayalan. Kalaupun masyarakat telah berada dalam posisi tidak lagi menyukai kebenaran objektif, maka mereka akan mudah dipengaruhi dan dikendalikan

oleh pihak-pihak yang memiliki kontrol atas sumber-sumber informasi tersebut. Tidak semua bentuk totalitarianisme modern menggunakan ancaman fisik, ia bisa muncul di sela sela banjirnya informasi *oversimplified* sehingga membuat manusia kehilangan orientasinya.

Ini lah alasan yang menjadikan pertanyaan *Quo Vadis, Indonesia?* menjadi begitu penting. Masa depan negara ini tidak hanya tergantung dari berhasil atau tidaknya negara Indonesia dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan, pengaplikasian digitalisasi, maupun pertumbuhan ekonomi. Masa depan Indonesia juga akan bergantung dari bagaimana negara tersebut mampu tetap menjaga budaya kebenaran, kewaspadaan intelektual, dan moralitas di tengah arus informasi digital. Dengan demikian, masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana dia bisa menjaga budaya pengetahuan, pikiran kritis, serta sikap moral dalam menghadapi arus informasi digital yang sangat besar ini. Karena itu, demokrasi sehat tidak akan mampu bertahan hanya berdasarkan pencarian kebenaran. *The search for truth* adalah unsur penting demokrasi, yang dengan sendirinya merupakan sarana untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Ketika pertanyaan tentang apa yang benar kehilangan daya tariknya, dan pragmatisme yang puas dengan apa yang tampak berguna atau efektif mulai berkuasa, maka kehidupan demokrasi melemah. Bagaimanapun, demokrasi tidak hanya terdiri dari aturan dan prosedur, tetapi di atas segalanya adalah kesesuaian yang kuat dengan fakta dan komitmen tulus terhadap kebaikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Alternatif yang ditawarkan oleh *Magnifica Humanitas* justru berkesinambungan dengan Pancasila yang menawarkan suatu visi pembangunan nilai-nilai etis yang berpusat pada tujuan antropologis manusia & *bonum commune*. Namun, harus diakui bahwa demokrasi kita jauh dari memuaskan, dan bahkan sebagaimana dibahas dalam Forum Guru Besar ITB, kehidupan sosial-politik Indonesia kian hari sangat keras, bengis, vulgar, kriminal & korup. Demokrasi kita memproduksi partai-partai tak bermutu yang memecah belah kepentingan rakyat, dari satu *common goal* menjadi fragmen-fragmen egoisme, hegemoni ideologis radikal & individualisme. Namun, partai politik yang semestinya berfungsi sebagai alat politik pendidikan IPTEK untuk masyarakat dan juga wadah artikulasi kepentingan rakyat seringkali malah digunakan sebagai peralatan bagi oligarki, patronase, atau juga kepentingan dari kalangan tertentu. Dengan demikian, demokrasi yang pada dasarnya adalah konsep yang menggabungkan segala keinginan warga masyarakat dalam satu visi bersama menjadi proses pertandingan yang kehilangan unsur

moralisasi. Kepentingan negara yang secara umumnya dijadikan sebagai landasan kesepakatan tersebut berubah menjadi potongan-potongan kepentingan sektoral, kelompok bahkan pribadi, politik Indonesia kehilangan dimensi hakikat manusia filsafat etis nya.

Sebaliknya, pendidikan, yang seharusnya diutamakan sebagai tujuan umum partai-partai politik Indonesia adalah proses yang panjang, menuntut kesabaran dan karenanya waktu untuk pengembangan dan untuk bergulat dengan realitas daripada sekadar penampilannya. Sangat penting untuk menyadari bahwa setiap teknologi memengaruhi individu yang menggunakannya. Mengajari seseorang untuk menggunakan AI berarti mendidiknya tentang kesempatan dan tujuan di mana instrumen canggih tersebut tidak boleh diterapkan. Kecepatan seseorang menerima jawaban atau ringkasan atas pertanyaan yang diajukan mengancam untuk meredam keinginan untuk mengajukan pertanyaan karena aktivitas ini tidak menghasilkan buah kecuali dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Menurut Plato, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari sesuatu yang berharga, melalui diskusi dengan orang lain, "menemukan" ide atau pengalaman, untuk menyalakan percikan pemahaman dalam diri sendiri.

Isu terakhir yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah ialah isu intelektual atau yang berkaitan dengan pengetahuan. Jika bidang ini tidak ditangani dengan sangat hati-hati, dapat terjadi masalah serius dengan kurangnya kecintaan pada kebenaran dalam proses pendidikan, dan informasi menjadi aliran tanpa akhir yang tidak mencakup komponen penting seperti penelitian, pemikiran, dan refleksi. Dengan fragmentasi pengetahuan yang terus-menerus, semakin sulit untuk memahami realitas secara keseluruhan, mengajukan pertanyaan yang bermakna, berpikir kritis, kreatif, dan otentik. Tanda-tanda awal dehumanisasi telah terdeteksi oleh beberapa guru, yang menunjukkan bahwa meskipun seseorang "mengetahui banyak hal," ia mungkin mengalami kesulitan dalam orientasi hidup karena kegagalan menghubungkan informasi dengan pengetahuan dan memiliki tujuan.

Visi pendidikan Indonesia seharusnya bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang melek teknologi, tetapi juga manusia yang cerdas, reflektif, dan jujur. Meskipun literasi digital sangat penting, literasi filosofis, etis, dan humanis juga harus dipupuk bersamaan dengan itu. Sekolah dan universitas tidak hanya diharapkan menghasilkan warga negara yang efisien dan produktif, tetapi juga warga negara yang mampu mempertanyakan makna, tujuan, nilai, dan kebenaran dalam hidup. Den-

gan mempertimbangkan bimbingan yang diberikan oleh Pancasila serta Ajaran Sosial Gereja, visi pendidikan saat ini harus selalu mencakup unsur humanisasi. Pendidikan harus menghasilkan pribadi yang holistik dan berwawasan luas, bukan hanya pribadi yang mahir di bidang keahliannya. Kejatuhan suatu bangsa bukanlah karena kurangnya teknologi, tetapi karena ketidakmampuan mereka untuk membedakan informasi dari kebenaran dan pengetahuan dari kebijaksanaan.

Penerapan Pancasila disini tidak semena-mena untuk keselamatan bangsa Indonesia secara utuh, Pancasila tidak boleh kita pahami sebagai sistem kepercayaan yang bersaing dengan agama-agama yang hidup dalam terang patriotisme di Indonesia. Sebagaimana dikatakan dalam Konsili Vatikan II, dalam *Gaudium Et Spes*, terdapat otonomi yang sah dari realitas duniawi. Negara memiliki politiknya sendiri, sementara Gereja Katolik memiliki tugas untuk pewartaan Injil demi keselamatan jiwa-jiwa di dunia, keduanya tidak identik & tidak dapat dicampur aduk, namun keduanya juga tidak dapat dipertentang demi menemukan sebuah alternatif dari permasalahan etis.

Pancasila adalah *ordo politicus* yang menjadi pilar moralitas dari rakyat Indonesia, pancasila dapat dihidupkan apabila masyarakat tidak terfragmentasi oleh pemahaman yang bertolak belakang untuk mencapai rekonsiliasi.

IV. SIMPULAN:

Pada akhirnya perdebatan mengenai AI, algoritma digital tidak bisa kita jadikan persoalan teknis, karena persoalan ini adalah persoalan moral manusia itu sendiri, itulah yang paling mendasar. Teknologi hanya menjadi sarana untuk memperbesar apa yang ada didalam diri manusia, tetapi sejatinya teknologi-lah yang harus melayani manusia, bukan manusia melayani teknologi. Ia dapat menjadi sarana pembebasan, dan juga alat penyusut kemampuan & kejujuran intelektual. Masa depan Indonesia hanya akan ditentukan dengan bagaimana rakyat akan memanusiakan manusia, mempertahankan hakikat & maknanya sebagai manusia sehingga manusia pada akhirnya menjadi pusat kolektif untuk pembangunan negara. Pancasila memang memiliki relevansi yang sangat luar biasa dalam isu ini, namun pancasila juga tidak boleh kita reduksi menjadi slogan politik & sebagai suatu sistem yang menyaingi agama-agama, kita memiliki Pancasila untuk diterapkan secara & secara nasional, dengan bangga kita mengatasnamakan Pancasila untuk mencapai suatu titik moral & politik yang memungkinkan berbagai budaya, filsafat, ideologi & tradisi untuk memiliki satu tujuan dengan *framework* yang merupakan produk lokal bangsa Indonesia. *Indonesia, quo vadis?* Jawabannya tergantung pada keputusan yang kita untuk mencari kebenaran atau propaganda, kebijaksanaan atau hanya informasi, solidaritas atau egoisme sepihak, dan kehormatan manusia atau hanya efisiensi belaka. Dengan tetap mempertahankan pilihan tersebut, Indonesia tidak akan jadi Menara Babel modern yang binasa menurut *Magnifica Humanitas* karena kemampuannya sendiri, tetapi akan menjadi peradaban yang menggabungkan iman, akal sehat, ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan seluruh masyarakat baik dalam skala nasional maupun global.

Daftar Pustaka

- Second Vatican Council. *Pastoral Constitution Gaudium et Spes*, 44:58 (1966), 1065.
- Paus Santo Yohanes Paulus II. *Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis* (30 Desember 1987), 570–572.
- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. Harcourt Brace Jovanovich, 1973.
- Majjhima Nikaya. *The Middle Length Discourses of the Buddha* (B. Nanamoli & B. Bodhi Translation), 1995.
- Goethe, J. W. von. *Faust: Part One* (D. Luke, Translation). Oxford University Press, 2003.
- QS Al Baqarah 2:30.
- Indonesia Overview – Educational Disparity in Indonesia. Educational Disparity in Indonesia*, 2024.
- Magnis Suseno, Franz. *Demokrasi, Ateisme & Seksualitas*, 2024, p. 57, 59–62.
- Paus Santo Yohanes Paulus. *Ensiklik Centessimus Annus* (1 Mei 1991), 46:83, 850–851.
- Paus Leo XIV. *Ensiklik Magnifica Humanitas* (15 Mei 2026), art. 94.
- Ibid.*, 100–110.
- Ibid.*, 127.
- Ibid.*, 129–133.
- Ibid.*, 139–141.